



## Pemkot Tepis Kebocoran Dana

### Siapkan Survei Tandingan Potensi Parkir

**YOGYAKARTA (SINDO)** – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera mengeluarkan survei tandingan potensi sektor parkir. Survei itu untuk menepis tuduhan kebocoran pendapatan.

Survei tandingan itu akan dilakukan Badan Perekonomian dan Pendapatan Daerah (P2D) Sleman. Salah satu tujuannya menepis tuduhan telah terjadi kebocoran pengelolaan parkir di tingkat Dinas Perhubungan (Dishub).

Kepala Perekonomian dan Pendapatan Daerah (P2D) Kota Yogyakarta Danang Soebagjono meyakini hasil survei yang nanti dikeluarkan merupakan fakta objektif yang terjadi di lapangan. Dia menganggap hasil survei yang telah dikeluarkan pihak luar kurang mencerminkan fakta yang ada, mengingat yang diteliti hanya potensi bruto saja.

"Yang ditukur oleh mereka (survei pihak luar) adalah jumlah kendaraan yang parkir dikalikan tarif. Padahal, tidak setiap hari kondisinya sama. Selain itu tidak semua pembayaran parkir diterima pemerintah," ujarnya kemarin.

Menurut Danang, dari total pendapatan yang diterima para juru parkir, pemerintah hanya mendapat jatah 40% saja. Itu pun tidak semua juru parkir menyerahkan kewajibannya secara penuh. Beberapa titik parkir bahkan hanya menyerahkan hasilnya 20% saja. Hal itu lantaran area parkir yang digunakan masuk tanah persil.

"Ada juga yang masuk KPPD (Kantor Pengelolaan Pajak Daerah). Contoh parkir di hotel ataupun mal," urainya.

Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui tim studi potensi parkir pernah melakukan penelitian dengan melibatkan 100 peneliti. Hasilnya, potensi penerimaan parkir ketika itu sebesar Rp6,7 miliar per tahun. Padahal, ketika itu tarif parkir yang diatur perda hanya sebesar Rp200 untuk mobil dan Rp100 untuk sepeda motor.

Sekarang ini tarif parkir telah dinaikkan. Untuk sepeda motor Rp500, mobil Rp1.500, bus besar Rp8.000, dan bus sedang Rp6.500.

Dalam praktiknya, sebagian besar juru parkir tidak mematuhi aturan. Sebagai contoh, di kawasan Jalan Malioboro tarif untuk sepeda motor mencapai Rp1000. Untuk mobil bisa mencapai Rp3000-5000. Bahkan, bus bisa ditarik Rp10.000 hingga Rp20.000. Penarikan liar ini sudah terjadi secara umum.

Lebih jauh, Danang berargument, realisasi pendapatan parkir 2007 sebesar Rp1,2 miliar merupakan hal yang wajar. Karena tidak semua perolehan parkir diserahkan pemerintah. Para juru parkir dan koordinator parkir sudah memangkasnya terlebih dahulu. "Bayangkan saja, jumlah juru parkir ada 820 orang. Mereka juga punya hak. Kalau satu orang Rp600.000, berarti dikalikan 820," katanya.

Pertimbangan lainnya, banyak titik-titik parkir yang dulu ada kini telah hilang.

Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana Dishub Kota Yogyakarta Moeljanto menambahkan, faktor utama yang membuat pemasukan ke daerah minim adalah kurangnya transparansi para juru parkir. Dishub telah berupaya bertindak tegas kepada para juru parkir yang tidak taat peraturan. "Bisa jadi ada oknum Dishub juga yang bermain. Bila tertangkap tangan, tentu akan ditindak tegas," katanya.

(arif budianto)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT	TINDAK LANJUT
1. <i>Bag. P. &amp; D</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat segera	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui
2. <i>Din. Hub</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
3. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa
4. ....			
5. ....			
6. ....			

Yogyakarta,  
17/9-'08 Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005